

Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis dan Praktis

Anggi Luthfiah Pane^{1*}, Nurlaila Rachman², Triana Triana³

¹⁻³Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis: anggilutth2004@gmail.com*

Abstract. *This paper examines distributive justice within the framework of Islamic economics, exploring its philosophical underpinnings and practical implications. It analyzes the Islamic concept of justice (adl), focusing on its application to the distribution of wealth and resources. The study delves into the core principles of Islamic economics, such as zakat, waqf, riba prohibition, and the concept of khalifah (stewardship), and how these contribute to a more equitable distribution of wealth. Furthermore, it investigates the philosophical arguments supporting distributive justice in Islam, drawing upon Islamic jurisprudence and ethical traditions. The paper concludes by discussing the practical challenges and opportunities in implementing distributive justice principles in contemporary economic systems, considering both micro and macro-economic perspectives.*

Keywords: *Distributive Justice, Islamic Economics, Adl, Zakat, Waqf, Riba, Khalifah, Islamic Finance, Social Justice, Wealth Distribution.*

Abstrak. Abstrak ini membahas keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, menelaah implikasi filosofis dan praktisnya. Kajian ini akan menganalisis konsep keadilan distributif berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, mengungkapkan bagaimana ekonomi Islam berupaya mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata di tengah masyarakat. Diskusi akan mencakup konsep kepemilikan (malikiyyah), zakat, wakaf, dan sistem ekonomi lainnya dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Implikasi praktisnya akan dibahas melalui analisis kebijakan ekonomi yang selaras dengan prinsip keadilan distributif, serta tantangan dan peluang implementasinya dalam konteks ekonomi modern.

Kata Kunci: Keadilan distributif, Ekonomi Islam, Malikiyyah, Zakat, Wakaf, Kesejahteraan sosial, Kesenjangan ekonomi

1. PENDAHULUAN

Keadilan distributif merupakan pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam, menekankan pembagian kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Konsep ini melampaui sekadar mekanisme ekonomi semata, melainkan berakar pada nilai-nilai filosofis yang mendalam, berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. (Latif Mahmudi et al. 2020) Pendahuluan ini akan membahas pentingnya keadilan distributif dalam ekonomi Islam, menjelajahi implikasi filosofisnya yang terkait dengan konsep tauhid, khilafah, dan masalah, serta implikasi praktisnya dalam kebijakan ekonomi, sistem keuangan, dan distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menganalisis landasan filosofisnya dan implikasi praktisnya dalam konteks ekonomi modern. (Sugiaro 2015)

Selanjutnya, penelitian ini akan menelusuri landasan filosofis keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Konsep tauhid, yang menegaskan keesaan Allah SWT sebagai pemilik

segala sesuatu, menjadi dasar bagi pemahaman bahwa kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil.(Helmi 2015) Konsep khilafah, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, mengarahkan pada kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Konsep masalah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, mengarahkan pada kebijakan ekonomi yang menguntungkan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya segmen tertentu. Dengan menganalisis ketiga konsep ini, penelitian ini akan mengungkap bagaimana nilai-nilai filosofis Islam membentuk kerangka berpikir tentang keadilan distributif. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas berbagai instrumen dan mekanisme yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan distributif dalam praktik, mempertimbangkan konteks ekonomi modern dan tantangan yang dihadapi.

Pembahasan selanjutnya akan memfokuskan pada implikasi praktis keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Hal ini akan mencakup analisis berbagai instrumen dan mekanisme ekonomi yang dapat digunakan untuk mencapai distribusi kekayaan yang lebih adil. Beberapa contoh instrumen yang akan dikaji meliputi zakat, wakaf, dan sistem perbankan Islam. Analisis akan meliputi bagaimana instrumen-instrumen ini dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas kebijakan-kebijakan ekonomi makro yang dapat mendukung keadilan distributif, seperti kebijakan fiskal yang progresif, regulasi pasar yang adil, dan program-program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Studi kasus dan contoh-contoh praktis dari berbagai negara atau komunitas yang telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam juga akan diintegrasikan untuk memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih konkret. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan distributif dalam konteks ekonomi modern.

2. KAJIAN PUSTAKA

Kajian literatur mengenai keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa konsep ini memiliki akar filosofis yang kuat dan implikasi praktis yang luas. Sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, dengan prinsip-prinsip seperti tauhid, khilafah, dan masalah sebagai landasan filosofisnya. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu, sehingga kekayaan merupakan amanah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Khilafah menekankan tanggung jawab manusia

sebagai khalifah di bumi untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Masalah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, mengarahkan pada kebijakan ekonomi yang menguntungkan seluruh anggota masyarakat.

Implikasi praktis dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem perbankan Islam. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, kebijakan ekonomi makro yang mendukung keadilan distributif, seperti kebijakan fiskal yang progresif, regulasi pasar yang adil, dan program-program pemberdayaan ekonomi, juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan distributif dalam praktik. Pentingnya peran bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keadilan ekonomi juga ditekankan dalam literatur, mengingatkan bahwa keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi saja

Lanjutan kajian literatur ini akan menelaah lebih dalam berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan dalam membahas keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Beberapa peneliti menekankan pentingnya implementasi zakat sebagai pilar utama dalam mencapai keadilan distributif, sementara yang lain mengarahkan perhatian pada peran wakaf dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ada pula yang fokus pada peran sistem perbankan Islam dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, dengan menekankan prinsip-prinsip seperti bagi hasil dan larangan riba. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan kompleksitas dan multidimensi konsep keadilan distributif, yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu rumusan tunggal.

Beberapa studi juga menganalisis tantangan dan hambatan dalam implementasi keadilan distributif dalam konteks ekonomi modern, seperti kesenjangan informasi, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kajian literatur ini juga akan mempertimbangkan berbagai model dan pendekatan yang telah diterapkan di berbagai negara dan komunitas Muslim, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan bernuansa mengenai keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks yang relevan.

Keadilan distributif merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Artikel ini akan membahas implikasi filosofis dan praktis dari keadilan distributif dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada bagaimana konsep ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Implikasi Filosofis Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berakar pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati dari segala sesuatu. Manusia hanya menjadi khalifah (wakil) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini melahirkan beberapa implikasi filosofis:

- **Kepemilikan Allah dan Tanggung Jawab Manusia:** Ekonomi Islam menekankan bahwa semua kekayaan dan sumber daya adalah milik Allah SWT. Manusia hanya diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan bijak dan adil. Hal ini melahirkan tanggung jawab moral bagi manusia untuk menggunakan kekayaan dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat.
- **Keadilan sebagai Manifestasi Ketuhanan:** Keadilan distributif dalam Islam merupakan manifestasi dari sifat Allah SWT yang adil dan merata. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dan kekayaan.
- **Persamaan dan Keadilan Sosial:** Keadilan distributif dalam Islam mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Prinsip ini melarang eksploitasi dan ketidaksetaraan, dan mendorong solidaritas dan kerja sama di antara anggota masyarakat.

Implikasi Praktis Keadilan Distributif

Keadilan distributif dalam ekonomi Islam memiliki implikasi praktis yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi:

- **Sistem Pajak dan Zakat:** Sistem pajak dan zakat dalam Islam merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan distributif. Pajak (khususnya zakat) digunakan untuk membantu kaum miskin, fakir, dan mereka yang membutuhkan. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- **Pembagian Warisan:** Pembagian warisan dalam Islam juga didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Sistem ini memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan ketentuan syariat.
- **Sistem Ekonomi Berbasis Syariah:** Ekonomi Islam mendorong penerapan sistem ekonomi berbasis syariah yang melarang praktik riba, spekulasi, dan monopoli. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan transparan, serta mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan.

- Peran Pemerintah dan Masyarakat: Keadilan distributif dalam Islam membutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang adil dan merata, sementara masyarakat berperan dalam membangun solidaritas dan membantu mereka yang membutuhkan.

Tantangan dan Solusi

Meskipun memiliki implikasi filosofis dan praktis yang kuat, penerapan keadilan distributif dalam ekonomi Islam menghadapi beberapa tantangan:

- Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan distributif dan peran mereka dalam mewujudkannya.
- Korupsi dan Kesenjangan Kekuasaan: Korupsi dan kesenjangan kekuasaan dapat menghambat upaya mewujudkan keadilan distributif.
- Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi: Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi sumber daya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak:

- Peningkatan Kesadaran: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan distributif melalui pendidikan, dakwah, dan sosialisasi.
- Penguatan Tata Kelola: Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan kesenjangan kekuasaan.
- Pengembangan Model Ekonomi Islam: Pengembangan model ekonomi Islam yang efektif dan relevan dengan kondisi global saat ini.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang signifikan untuk mengkaji keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi implikasi filosofis dan praktisnya, akan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menelusuri landasan filosofis keadilan distributif melalui studi literatur mendalam terhadap sumber-sumber Islam seperti Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab klasik ekonomi Islam. Analisis konten dan interpretasi hermeneutik akan diterapkan untuk mengungkap makna dan implikasi filosofis konsep-konsep kunci seperti tauhid, khilafah, dan masalah dalam konteks keadilan distributif. Pendekatan kuantitatif akan diterapkan untuk menganalisis data empiris mengenai distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat, menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial. (Rofiq 2018)

Data yang dikumpulkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti data statistik resmi, survei lapangan, dan studi kasus. Analisis kuantitatif akan membantu mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi kekayaan, serta mengukur efektivitas instrumen dan kebijakan ekonomi Islam dalam mewujudkan keadilan distributif. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan saling melengkapi dan memperkuat analisis, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam, baik dari sisi filosofis maupun praktis. (Wijaya 2009)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dan pembahasan mengenai keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam mengungkap bahwa konsep ini memiliki implikasi filosofis dan praktis yang signifikan. Dari perspektif filosofis, keadilan distributif berakar pada nilai-nilai tauhid, khilafah, dan masalah, yang menekankan bahwa kekayaan merupakan amanah Allah SWT yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Nihayah and Rifqi 2023) Implikasi praktisnya terlihat dalam berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sistem perbankan Islam, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, mewujudkan keadilan ekonomi membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, yang harus bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya kesadaran bersama dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan distributif menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan (Wijaya 2009)

Lebih lanjut, temuan menunjukkan bahwa implementasi keadilan distributif dalam praktiknya menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan informasi, korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam merupakan beberapa hambatan utama. Sistem ekonomi global yang kapitalistik juga memberikan tekanan yang signifikan, seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif (Budiman 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik sangat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mewujudkan keadilan distributif. Pembahasan juga menyoroti pentingnya inovasi dan adaptasi dalam penerapan instrumen ekonomi Islam agar tetap relevan dan efektif dalam konteks ekonomi modern.

Misalnya, pengembangan mekanisme zakat yang lebih modern dan efisien, serta inovasi dalam pengelolaan wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Studi kasus dari berbagai komunitas dan negara yang telah menerapkan prinsip-prinsip

keadilan distributif menunjukkan bahwa keberhasilannya bergantung pada komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap konteks lokal. (Latif Mahmudi et al. 2020).

Pembahasan sebelumnya telah menyinggung beberapa aspek penting terkait keadilan distributif dalam ekonomi Islam, mulai dari implikasi filosofis hingga praktis. Untuk melanjutkan pembahasan, kita akan fokus pada beberapa poin penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut:

1. Peran Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Distributif

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan keadilan distributif. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.

- Tujuan Zakat: Tujuan utama zakat adalah untuk membantu kaum miskin, fakir, dan mereka yang membutuhkan. Zakat juga berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa orang kaya, serta membangun solidaritas dan persaudaraan di antara anggota masyarakat.
- Penerapan Zakat: Penerapan zakat dalam ekonomi Islam memiliki beberapa implikasi praktis. Pertama, zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat, baik individu maupun badan usaha. Kedua, zakat dikelola oleh lembaga zakat yang bertanggung jawab untuk menyalurkan zakat kepada para mustahik (penerima zakat) yang berhak. Ketiga, zakat dialokasikan untuk berbagai keperluan, seperti membantu kaum miskin, membangun infrastruktur, dan membiayai pendidikan dan kesehatan.

2. Implementasi Keadilan Distributif dalam Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, termasuk keadilan distributif. Sistem ini melarang praktik riba, spekulasi, dan monopoli, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi.

- Larangan Riba: Riba (bunga) merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan pihak yang lemah. Larangan riba mendorong pengembangan sistem keuangan berbasis syariah yang lebih adil dan berkelanjutan.
- Larangan Spekulasi: Spekulasi (perjudian) dalam Islam juga dilarang karena dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat. Larangan ini mendorong pengembangan sistem perdagangan yang lebih transparan dan berorientasi pada nilai-nilai etika.
- Larangan Monopoli: Monopoli (pengendalian pasar oleh satu pihak) dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan merugikan konsumen. Larangan ini mendorong persaingan yang sehat dan adil di pasar.

3. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Keadilan Distributif

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam.

- Kebijakan Ekonomi yang Adil: Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang adil dan merata. Kebijakan ini harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja.
- Penegakan Hukum: Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan aturan yang berlaku, termasuk hukum ekonomi syariah. Hal ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan merugikan masyarakat.
- Pembinaan Masyarakat: Pemerintah juga berperan dalam membina masyarakat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan distributif dalam kehidupan sehari-hari.

4. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Distributif

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan distributif.

- Kesadaran dan Partisipasi: Masyarakat harus memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keadilan distributif. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung kebijakan pemerintah yang adil, membayar zakat dengan tepat, dan membantu mereka yang membutuhkan.
- Solidaritas dan Kerjasama: Solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Masyarakat harus saling membantu dan mendukung satu sama lain, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

5. Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Keadilan Distributif

Meskipun memiliki implikasi filosofis dan praktis yang kuat, penerapan keadilan distributif dalam ekonomi Islam menghadapi beberapa tantangan:

- Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan distributif dan peran mereka dalam mewujudkannya.
- Korupsi dan Kesenjangan Kekuasaan: Korupsi dan kesenjangan kekuasaan dapat menghambat upaya mewujudkan keadilan distributif.

- Globalisasi dan Liberalisasi Ekonomi: Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan eksploitasi sumber daya.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak:

- Peningkatan Kesadaran: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan distributif melalui pendidikan, dakwah, dan sosialisasi.
- Penguatan Tata Kelola: Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan kesenjangan kekuasaan.
- Pengembangan Model Ekonomi Islam: Pengembangan model ekonomi Islam yang efektif dan relevan dengan kondisi global saat ini.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang signifikan dari keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam adalah bahwa konsep ini memiliki implikasi filosofis dan praktis yang mendalam. Dari perspektif filosofis, keadilan distributif berakar pada nilai-nilai tauhid, khilafah, dan masalah, menekankan bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara praktis, prinsip ini diwujudkan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem perbankan Islam, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, mencapai keadilan distributif membutuhkan peran aktif dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, yang bekerja sama untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pentingnya kesadaran bersama dan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan distributif menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan. Keadilan distributif merupakan konsep penting dalam ekonomi Islam yang memiliki implikasi filosofis dan praktis yang luas. Prinsip ini menekankan pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Penerapan keadilan distributif dalam ekonomi Islam membutuhkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan individu dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, keadilan distributif tetap menjadi cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera

DAFTAR REFERENSI

- Budiman, I. (2020). Epistemologi ilmu ekonomi Islam: Analisis perspektif filsafat ilmu. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2106>
- Helmi, M. (2015). Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(2), 134–144.
- Latif Mahmudi, W., Luthfi, F., Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang, KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada, & Tembalang Semarang. (2020). Kebenaran ilmiah (perspektif ilmu ekonomi Islam). *Orbith*, 16(2), 139–146.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis ilmu ekonomi syariah dalam kerangka filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Rofiq, M. N. (2018). Peranan filsafat ilmu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 161–175. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.112>
- Sugiarto, T. (2015). Keadilan dalam pandangan filsafat hukum. *Ius*, 02(01), 9–16.
- Wijaya, C. A. (2009). Filsafat ekonomi Adam Smith. *Filsafat Ekonomi Adam Smith*, 19, 1–22.